

# JURNAL KOMUNIKASI

---

---

Volume 4, Nomor 1, Oktober 2009

ISSN 1907-848X

Halaman 01 - 102

---

---

## DAFTAR ISI

### Editorial

**Netralitas dan Keseimbangan Pemberitaan Surat Kabar Daerah  
dalam Pilkada DIY 2005 Tahap Kampanye Terbuka  
(Analisis Isi Harian Kedaulatan Rakyat dan Kompas Yoga)**

*Anang Hermawan*

(01 - 24)

**Mengupayakan Manajemen Media Massa yang Menghargai Jurnalis**

*Bambang MBK*

(25 - 38)

**Benturan Kepentingan dalam Manajemen Berita Televisi**

*Mite Setiansah*

(39 - 50)

**Literasi Media Keluarga Desa**

*Diyah Hayu R.*

(51 - 62)

**Blog: Menuju *Virtual Public Sphere*?**

*Muzayin Nazaruddin*

(63- 72)

**"Online Culture"**

*Luthfi Adam*

(73 - 84)

**Perempuan dalam Narasi Pascakolonial  
(Novel *Bekisar Merah* Karya Ahmad Tohari)**

*Anhar Widodo*

(85 - 94)

**Tentang Judul Itu...  
(Menyoal "Matinya" Ilmu Komunikasi)**

*Iwan Awaluddin Yusuf*

(95 - 102)

## Mengupayakan Manajemen Media Massa yang Menghargai Jurnalis

**Bambang MBK<sup>1</sup>**

### **Abstract**

*There are many mass media organisations in Indonesia that pay their journalists' salary in a very low amount. This condition creates a lot of negative impacts, especially to media role as the fourth estate in a democratic society. This article suggests a new perspective for media management to put consideration on this matter. Thus, universities which have communication department have an important role to integrate this issue into their curriculum. Media management lectures, then, is not only consist of theoretical and practical matters in operating a media. But, these also consist of awareness of the journalist rights.*

### **Keywords:**

*Mass media management, social security for journalists, workers union.*

### **Pendahuluan**

Anak saya yang berumur sembilan tahun, Mutiara, mempunyai cita-cita menjadi seorang jurnalis. Keinginannya ini tentu karena hampir setiap hari melihat cara kerja ayahnya. Tidak perlu memakai seragam, kerjanya hanya jalan-jalan, persis seperti digambarkan dalam komik serial Tintin<sup>2</sup>. Kadang-kadang ketika tiba di rumah dengan bangga dapat bercerita jika baru saja bertemu orang terkenal untuk keperluan wawancara. Mengasyikkan.

Akan tetapi, itu baru sebagian dari realitas keseharian seorang jurnalis. Jurnalis yang mampu membuat *public opinion* juga lekat dengan kekuasaan yang sangat besar. Lihatlah dua wartawan legendaris The Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein, yang karena liputan investigasinya dapat 'menurunkan' Presiden AS kala itu, Richard Nixon, dari singgasananya<sup>3</sup>.

Begitu pula dengan Veronica Guerrine dari Irlandia, sosok seorang jurnalis perempuan yang sangat gigih. Dengan gagah berani ia seorang diri membuat liputan investigasi tentang mafia perdagangan obat bius. Karena liputannya, Irlandia kemudian mempunyai UU anti narkoba. Namun sayang, karena liputannya itu pula, Veronica mati ditembak anggota mafia obat bius.

Sementara di dalam negeri, dibebaskannya Prita Mulyasari dari rumah tahanan perempuan Tangerang, yang ditahan karena kasus 'curhat' di dunia maya dianggap

---

<sup>1</sup> Penulis adalah seorang *freelance journalist*, anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, dan mengajar di sejumlah universitas di Yogyakarta.

<sup>2</sup> Tetapi lucunya, dalam komik tersebut Tintin yang juga seorang wartawan itu jarang dikisahkan membuat berita.

<sup>3</sup> Kisah kedua wartawan ini sudah difilmkan dengan judul *All the President's Men*.

mencemarkan nama baik rumah sakit Omni Internasionalnya kira juga tidak terlepas dari peran para jurnalis. Liputan mereka tentang kasus ini berhasil membangkitkan rasa simpati khalayak yang akhirnya menggumpal menjadi tekanan maha hebat. Apalagi, berita ini juga menggerakkan para calon presiden untuk memberikan komentarnya, bahkan Megawati menyempatkan diri untuk mengunjunginya di LP Wanita Tangerang.

Diakui atau tidak, jurnalis (kadang-kadang) menjadi pahlawan! Itulah sebabnya mengapa banyak orang ingin menjadi jurnalis. Ada kekuasaan besar di tangannya. Tidak heran jika Napoleon Bonaparte dari Perancis lebih takut dengan tulisan jurnalis dari pada 1000 serdadu. Sedangkan di Indonesia, dengan hanya menunjukkan kartu pers dapat lolos dari operasi rutin polisi yang mencari pengendara sepeda motor yang tidak mempunyai SIM atau STNK. Menakutkan!

Namun sayang, di Indonesia pekerjaan yang diidamkan banyak orang ini ternyata memiliki sisi kelam. Hingga saat ini banyak jurnalis masih mendapatkan gaji rendah dari perusahaan media massa tempat mereka bekerja. Maka, wajar jika para jurnalis biasanya mempunyai 'periuk' cadangan untuk menjaga agar dapurnya tetap *ngebul*.

'Periuk' cadangan ini bermacam-macam mulai dari yang legal seperti berbisnis, hingga yang ilegal. Seorang teman saya pernah bercerita tentang pengalaman 'menggelikan' dari seorang jurnalis di Kabupaten Klaten beberapa tahun silam. Jika sang jurnalis itu kehabisan uang, maka ia akan mendatangi polisi lalu lintas dan mengajaknya menggelar operasi rutin! Akhirnya si jurnalis dan polisi lalu lintas itu akan berbagi uang hasil suap yang diberikan para pengendara motor yang tidak punya STNK atau SIM<sup>4</sup>.

Anda tentu akan tercengang jika saya mengatakan bahwa hingga awal 2009 masih ada jurnalis yang bekerja di sebuah media massa lokal Yogyakarta hanya bergaji pokok sebesar Rp 21.000 per bulan! Ditambah dengan berbagai tunjangan, *take home pay* mencapai hampir Rp 2 juta. Bagaimana mungkin seorang jurnalis yang mempunyai tanggung jawab besar dalam mendidik masyarakat luas hanya mempunyai gaji pokok sekecil itu?<sup>5</sup>

Realitas ini memang sangat memprihatinkan, tetapi itulah kenyataan yang terjadi. Manajemen media massa di Indonesia masih belum menempatkan jurnalis di posisi terhormat bila dilihat dari gaji yang didapatkannya.

### **Manajemen Media Massa yang Buruk**

Manajemen media massa dapat diartikan sebagai cara atau mekanisme pengaturan internal media massa, sehingga lembaga ini dapat berfungsi dan dapat menghasilkan *output* (berita) sesuai dengan yang diharapkan. Manajemen yang baik dapat mensinergikan antara bagian redaksi, pemasaran dan percetakan dalam level ideal dan efisien, sehingga dapat menghasilkan berita yang bagus dan tirus atau ratingnya selalu naik.

<sup>4</sup> Sudah bukan rahasia umum lagi jika polisi dan jurnalis yang mempunyai *beat* kriminal biasanya mempunyai kedekatan luar biasa, sehingga hampir tidak ada jarak lagi. Itulah sebabnya jarang ada berita kritis terhadap polisi. Berita yang muncul biasanya adalah keberhasilan polisi dalam menggulung berbagai kasus kriminal. Lazim pula para polisi itu kadang-kadang memberikan 'berita jadt' lengkap dengan fotonya kepada para jurnalis di bidang kriminal.

<sup>5</sup> Informasi yang saya dapat mengatakan setelah terjadi pergantian kepemimpinan di bulan April 2009, mulai ada pembaruan soal gaji. Dimulai dari tingkat redaktur, gaji mereka per Juni 2009 mencapai antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta.

Jurnalis yang berada di bawah atap redaksi adalah salah satu unsur 'onderdil' penting dalam 'mesin' media massa. Di dalam sistem manajemen itulah, nasib jurnalis ditentukan, kewajiban apa yang harus ia kerjakan (berdasarkan pembagian kerja), dan hak-hak apa saja yang ia dapatkan sebagai bentuk imbalan atas jerih payahnya dalam bekerja.

Dalam lembaga media massa, peran jurnalis sangat penting karena jurnalislah yang menghasilkan produk (berita) untuk dijual. Tanpa ada jurnalis, maka perusahaan media massa tidak dapat berfungsi dan menghasilkan berita. Boleh dikatakan jurnalis adalah ujung tombak dalam bisnis media massa. Meski demikian, tanpa ada dukungan dari unsur lainnya, jurnalis sebaik apa pun juga tidak akan bisa berbuat banyak.

Meskipun menjadi ujung tombak dalam bisnis media massa, manajemen dari banyak media massa di Indonesia masih belum memperlakukan jurnalis sebagai pekerja yang layak mendapat penghargaan (gaji) yang tinggi. Rendahnya gaji para jurnalis di Indonesia sebetulnya merefleksikan (diakui atau tidak) buruknya manajemen media massa di Indonesia. Mereka masih melihat jurnalis sebagai pekerja biasa yang dapat dibayar 'ala kadarnya'.

Di kawasan Asia, jurnalis Indonesia termasuk yang paling rendah pendapatannya. Menurut majalah *Asiaweek* yang melakukan penelitian pada tahun 2000, gaji jurnalis di Indonesia masih kalah dengan teman sejawat dari Cina (193 dolar AS), Filipina (294 dolar AS), India (321 dolar AS), Thailand (357 dolar AS), Malaysia (1.125 dolar AS), dan Taiwan (1.608 dolar AS). Bila dibandingkan dengan negara-negara supermakmur seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Australia, gaji jurnalis dari media massa paling besar di Indonesia pun masih belum ada apa-apanya<sup>6</sup>.

Gambaran betapa buruknya gaji para jurnalis itu dapat dilihat pada hasil penelitian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tahun 2005. Penelitian yang melibatkan sekira 400 jurnalis sebagai responden yang tersebar di 17 kota itu hasilnya sebagian besar jurnalis (47 persen) hanya menerima gaji antara Rp 600 ribu hingga Rp 1,8 juta<sup>7</sup>. Bahkan, data penelitian itu juga menunjukkan masih ada jurnalis yang bergaji Rp 200 ribu per bulan!

**Tabel 1.**  
**Gaji Jurnalis di Indonesia**

Sumber: Potret Jurnalis Indonesia: Survey AJI Tahun 2005 tentang  
Media dan Jurnalis Indonesia di 17 Kota

No.	GAJI PERBULAN (Rp)	PERSENTASE
1	Tidak menjawab	2,3 %
2	5 juta lebih	1,3 %
3	4,6-4,999 juta	0,5%

<sup>6</sup> Dikutip dari Rochman Budiyo dan Mabroer MS, *Potret Sosial Ekonomi Jurnalis Jawa Timur: Kesejahteraan Jurnalis antara Mitos dan Kenyataan*, Surabaya, AJI Surabaya bekerja sama dengan The Asia Foundation, Juli 2000, hal 8.

<sup>7</sup> Lihat dalam *Potret Jurnalis Indonesia: Survey AJI Tahun 2005 tentang Media dan Jurnalis Indonesia di 17 Kota*, Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Agustus 2006.

No.	GAJI PERBULAN (Rp)	PERSENTASE
4	4,2 - 4,599 juta	1,3%
5	3,8 - 4,199	1,3 %
6	3,4 - 3,799 juta	1,0 %
7	3 - 3,999 juta	2,5 %
8	2,6 - 2,999 juta	3,0 %
9	2,2 - 2,599 juta	5,8%
10	1,8 - 2,198 juta	5,5%
11	1,4 - 1,799 juta	16,5%
12	1 - 1,399 juta	25,3%
13	600 - 999 ribu	22,5%
12	200 - 599 ribu	10,0%
13	Di bawah 200 ribu	1,5%

Menjelang akhir tahun 2008, AJI Yogyakarta mencoba membuat standar upah layak jurnalis yang disesuaikan dengan kebutuhan seorang jurnalis. Survei ini sampai pada kesimpulan bahwa minimal upah layak jurnalis di Yogyakarta adalah Rp 2,7 juta. Angka ini adalah untuk para jurnalis yang baru masuk kerja dan belum mempunyai keluarga. Jika masa kerja makin lama dan sudah berkeluarga, angka ini tentu akan naik. Waktu survei ini diluncurkan, tidak ada media massa di Yogyakarta yang mampu memberikan gaji kepada jurnalis muda sebesar itu.

Dewan Pers juga mengakui betapa rata-rata gaji jurnalis di Indonesia masih kecil dan bahkan masih dibawah UMP (Upah Minimum Provinsi). "Masih banyak wartawan yang bergaji rendah, di bawah UMP. Padahal, wartawan selalu dituntut profesional. Tuntutan itu akan sulit tercapai jika wartawan digaji secara tidak layak."<sup>8</sup>

Memang setiap perusahaan media massa mempunyai kemampuan berbeda dalam memberikan gaji kepada jurnalisnya. Tergantung apakah media itu beroplah besar atau sedikit. Ketua Dewan Pers, Ichlasul Amal, pernah menyitir ucapan pemilik Jawa Pos Group, Dahlan Iskan, yang mengatakan, "...Ketika wartawan masuk ke perusahaan, mestinya dia sudah tahu perusahaannya itu tipe apa. Ibaratnya rumah tipe 36 atau tipe 45. Kalau tahu tipe 36, ya jangan berharap tipe 80."<sup>9</sup>

Untuk media massa baru yang muncul sesudah era reformasi (1998) dan belum mapan, kondisi manajemennya sungguh sangat runyam. Dengan adanya kemudahan untuk mendirikan media massa, banyak orangterkadang hanya bermodal cekakmencoba mengadu untung dengan menjalankan bisnis ini. Karena asal-asalan, ada perusahaan

<sup>8</sup> Ringkasan Siaran Dewan Pers Menjawab, TVRI, 4 Oktober 2006, "Diperlukan Standar Gaji Wartawan", dalam *ETIKA, Berita Dewan Pers* edisi No.42, November 2006.

<sup>9</sup> Kutipan ini dapat dilihat dalam tulisan berjudul *Lebih dekat dengan Ichlasul Amal, Ketua Dewan Pers Dua Periode* yang dimuat dalam <http://sosokteladan.epajak.org/category/ichlasul-amal>

media massa yang membiarkan jurnalisnya mencari gaji sendiri dengan bersenjatakan kartu pers.

Ada pula yang mewajibkan para jurnalisnya mencari iklan. Dari sanalah sang jurnalis akan mendapat tambahan uang dari beberapa persen *fee* dari total biaya iklan yang didapatnya<sup>10</sup>. Lebih aneh lagi, ada juga perusahaan media massa yang mewajibkan jurnalisnya mencari pelanggan dan bahkan memasang poster di malam hari yang berisi berbagai berita menarik yang akan terbit di koran esok hari.

Media massa yang asal-asalan terbit tentu tidak layak untuk dibicarakan secara serius. Lebih layak membicarakan media massa yang memang serius ingin menjadi sebuah lembaga yang dapat memposisikan dirinya sebagai *the fourth estate*. Namun, ada banyak perusahaan media massa besar yang tetap memberikan gaji kecil kepada para jurnalisnya. Kisah yang saya ungkapkan di bagian pendahuluan tulisan ini adalah sebuah bukti. Beberapa waktu lalu ketika terjadi eksodus jurnalis secara besar-besaran dari sebuah stasiun televisi swasta ke stasiun televisi baru juga didorong oleh ketidakpuasan para jurnalis televisi akan kecilnya gaji yang mereka terima. Apakah stasiun televisi yang mereka tinggalkan tidak mampu menggaji mereka secara layak, saya kira tidak jawabannya. Ada persoalan yang sangat kompleks dan saling berkaitan.

Media massa di Indonesia makin berkembang sejak era reformasi tahun 1998, ketika 'layar' kebebasan pers mulai berkembang. Untuk mendirikan media massa (pers) tidak perlu ada lagi izin dari pemerintah berupa Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan Surat Ijin Terbit (SIT). Maka, media massa baru pun bermunculan. Setelah memasuki era reformasi, jumlah koran meningkat hingga 378 persen (dari 79 menjadi 299), majalah naik 341 persen (dari 144 menjadi 491), dan tabloid 1.007 persen (dari 88 menjadi 886).<sup>11</sup> Selain itu, ratusan radio dan puluhan stasiun TV baru juga bermunculan. Ini semua menyebabkan persaingan antarmedia massa sangat ketat.

Persaingan ketat membutuhkan modal yang banyak agar media massa yang baru itu bisa *survive*. Efisiensi menjadi suatu hal yang sangat penting dan salah satu opsinya adalah menekan gaji jurnalis serendah mungkin. Sebagai contoh, sebuah grup media massa yang mempunyai jaringan koran hampir di seluruh Indonesia. Tentu grup ini memiliki modal sangat besar. Namun, ketika seorang jurnalis membuat berita untuk korannya dan kemudian dimuat di koran lainnya yang masih satu grup, sang jurnalis itu tidak mendapat *fee* atas pemuatan beritanya di koran lain tersebut. Jadi, satu berita dapat disebar ke banyak media massa dalam satu grup, sangat efisien.

Selain krisis ekonomi, pada saat yang hampir bersamaan muncul pula globalisasi, demokratisasi, inovasi dan kemajuan teknologi, privatisasi media massa publik dan konglomerasi. Penelitian International Federation of Journalist (IFJ) yang didukung International Labour Organization (ILO) pada 2006 mengatakan kondisi ini menyebabkan perubahan dalam pola manajemen media massa. Akibatnya, pekerja jurnalistik menjadi lebih rentan (dibayar murah), tidak terlindungi dan intensitas kerjanya lebih keras lagi. Pekerja (jurnalis) dikontrak secara individual dan jurnalis senior digantikan oleh yang muda-muda.

<sup>10</sup> Ada kasus yang lebih buruk lagi ketika para jurnalis juga diwajibkan mencari pelanggan. Bahkan, pernah ada kasus jurnalis juga wajib membantu perusahaan media massa dalam menempelkan poster-poster iklan tentang koran yang terbit pada hari itu.

<sup>11</sup> Lihat dalam Tim AJI Jakarta, *Pekerja Pers Berserikat untuk Kesejahteraan dan Profesionalisme*, Jakarta, April 2001.

Tawaran gaji yang rendah ini tidak serta merta menghentikan banyak jurnalis muda untuk bekerja. Pasalnya, *pertama*, jumlah angkatan kerja sangat besar. Sementara, pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang besar. Kondisi ini menyebabkan daya tawar pekerja menjadi sangat rendah, sehingga mereka mau bekerja meskipun dibayar dengan harga murah.

*Kedua*, media massa cenderung lebih mengutamakan keuntungan finansial. Marvin Kalb mengatakan, "*News has become a big business not controlled by powerful families, but by media moguls who place a higher priority on the size of the profits than on the value of their contributions to society*"<sup>12</sup>.

Seorang teman jurnalis pernah bercerita, pemilik koran tempat ia bekerja tidak peduli apakah korannya membuat berita bagus atau tidak. Yang penting korannya laku, tidak lebih dan tidak kurang.

*Ketiga*, seperti terungkap melalui penelitian Dewan Pers, hanya sekitar 30 persen dari 829-an media massa di Indonesia yang sehat secara bisnis. Artinya, ada kemungkinan hanya 30 persen media yang dapat memberikan kesejahteraan yang bagus bagi para jurnalisnya. Logikanya, jika 70 persen sisanya tidak sehat secara bisnis, bagaimana mungkin mereka akan memberikan kesejahteraan yang bagus bagi para jurnalisnya? *It's impossible!*

*Keempat*, ada kemungkinan ini juga dampak dari wacana tentang manajemen media massa di Indonesia yang jarang menyinggung tentang bagaimana perlakuan terhadap jurnalis. Buku-buku soal manajemen media massa yang terbit di Indonesia pun minim membahas persoalan ini. Lihat misalnya buku berjudul *Manajemen Penerbitan Pers* karya Drs. Totok Djuroto, M.Si. (Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, cetakan ketiga, 2004). Semua bagian di buku itu hanya bicara tentang hal-hal teknis yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam media massa. Seperti apa jurnalis itu, peran redaktur, redaktur pelaksana, bagaimana mengatur *newsroom* dan lain sebagainya.

Wacana tentang manajemen media massa yang berkembang di berbagai perguruan tinggi juga jarang (untuk tidak menyebutkan tidak sama sekali) membicarakan tentang pentingnya memberi gaji tinggi bagi para jurnalis. Konsekuensinya, para calon jurnalis juga tidak mempunyai bekal pengetahuan soal ini.

Berbagai buku tentang jurnalisisme juga hampir tidak ada yang membicarakan tentang pentingnya kesejahteraan jurnalis yang memadai. Padahal, kondisi kesejahteraan jurnalis juga mempunyai dampak besar terhadap *performance* jurnalis dalam menjalankan fungsinya. Jika perut mereka masih 'lapar' apakah mungkin dapat mempertahankan idealisme secara terus menerus?

Wacana ini pula yang berkembang di dunia akademik, terutama di jurusan komunikasi. Di kebanyakan jurusan komunikasi hanya diajarkan bagaimana seorang jurnalis harus bekerja, sesuai dengan kode etik jurnalistik, tetapi tidak mengajarkan prasyarat apa yang harus ada dan apa yang harus mereka perjuangkan (terhadap perusahaan media massa), sehingga jurnalis dapat bekerja secara benar.

---

<sup>12</sup> Dikutip dari buku William A. Hachten, *The Troubles of Journalism: A Critical Look at What's Right and Wrong With the Press*, Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 2005, hal 54.

Seorang teman yang menjadi redaktur di harian lokal pernah berkeluh kesah tentang salah seorang jurnalis baru yang baru saja lulus alias *fresh graduate* dari sebuah jurusan komunikasi sebuah perguruan tinggi swasta ternama di Yogyakarta. Kebetulan koran lokal ini tidak terlalu bagus dalam memberikan gaji kepada para jurnalisnya. “Sungguh kacau, anak ini baru lulus, kok sudah *amplopan*,” keluh teman saya tadi itu.

### **Dampak dari Kesejahteraan Jurnalis yang Buruk**

Jika banyak jurnalis di Indonesia masih menerima amplop atau pemberian uang dari narasumber, sungguh tidak adil jika hal ini ditimpakan kesalahannya kepada jurnalis sendiri. Ada sebab eksternal (sosiologis) yang membuat mereka berbuat seperti ini, yaitu manajemen media massa yang tidak 'memanusiakan' para jurnalis.

Mereka melakukan itu karena terpaksa demi tuntutan hidup<sup>13</sup>. Ketika waktu mereka habis untuk bekerja, menerima 'amplop' adalah cara paling mudah untuk tetap bertahan hidup. Jurnalis juga manusia biasa yang harus menghidupi diri dan keluarganya secara layak.

“Jika gaji dari kantor masih kecil, saya tetap akan menerima amplop,” ujar salah seorang fotografer media cetak lokal di Yogyakarta kepada penulis<sup>14</sup>. Saya kira ini adalah bentuk pelanggaran kode etik yang paling banyak dilakukan jurnalis Indonesia<sup>15</sup>.

Menerima amplop adalah salah satu dampak yang paling tampak dari salah urus manajemen media massa terhadap para jurnalis. Jelas ini tidak dapat dibenarkan karena melanggar kode etik jurnalistik. Jurnalis menjadi tidak independen dan cenderung membela narasumber yang sudah memberikan amplop.

“Hanya dengan sehat bisnis (perusahaan media massa), wartawan jujur bisa hidup,” ujar Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara dalam acara Dewan Pers Menjawab yang disiarkan TVRI, 7 November 2007<sup>16</sup>.

Banyak para pemerhati pers mengatakan kebiasaan memberi amplop kepada jurnalis itu dimulai sejak awal Orde Baru ketika korupsi mulai menjadi sebuah tradisi. Kebiasaan memberikan 'amplop' kepada para jurnalis ini juga ikut menyumbang bagi terjadinya ekonomi biaya tinggi sebab semua lembaga baik pemerintah maupun swasta harus mengalokasikan biaya untuk pemberitaan.

Dampak selanjutnya adalah jurnalis tidak bisa bekerja dengan gigih dan condong mencari berita yang mudah. Mereka jarang membuat berita mendalam. Bagaimana akan membuat berita mendalam (investigasi) jika penghargaan kepada mereka sangat minim? Akibatnya, banyak persoalan serius yang terjadi di masyarakat yang jarang terangkat ke permukaan. Masyarakat hanya mengetahui berbagai isu yang kebetulan diangkat para pejabat atau pihak kepolisian.

---

13 Namun, tidak semua jurnalis mempunyai pandangan seperti itu. Mereka yang mempunyai pandangan idealis tetap tidak menerima amplop walaupun gajinya kecil.

14 Dialog ini terjadi pada Mei 2009 lalu saat membahas adanya kemungkinan kenaikan gaji di media massa cetak tempat sang fotografer itu bekerja.

15 Kode Etik Jurnalistik pasal 6 menyebutkan, “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Penafsiran poin B: Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Pelanggaran ini yang paling banyak sebab berbagai pihak siapa pun mereka masih suka memberikan amplop kepada wartawan. Banyak wartawan yang menerima dengan alasan sekadar menerima dan tidak meminta.

16 *ETIKA, Berita Dewan Pers*, No.55 November 2007

Berikutnya, jurnalis membuat berita 'setengah iklan'. Karena ia sudah dibayar pihak tertentu untuk membuat suatu berita (biasanya suatu produk), hasilnya adalah berita yang tidak kritis dan cenderung memoles produk itu menjadi bagus. Selain menjerumuskan masyarakat, hal yang demikian ini juga merugikan perusahaan karena kehilangan pemasukan dari iklan. Produsen barang cenderung memilih memberikan amplop kepada sang jurnalis dengan harapan mereka mau menulis produk itu dan hal ini lebih murah daripada harus membayar ruang iklan<sup>17</sup>.

Dampak keempat, media massa tidak sepenuhnya dapat menjadi alat kontrol karena para jurnalisnya tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Rendahnya penghargaan terhadap kinerja mereka menyebabkan militansi jurnalis dalam menggali berita menjadi rendah. Jurnalis cenderung meliput berita jadi (jumpa pers, acara seremonial) dan jarang mencoba menggali berbagai persoalan publik yang ada. Dalam konteks inilah kita dapat mengerti mengapa jarang muncul berita-berita dalam format investigasi atau *indepth reporting*.

Kelima, mayoritas berita yang muncul di media massa berformat *talking news*. Ini adalah produk berita yang paling mudah dibuat. Dalam wacana jurnalisme hal ini menjadi persoalan karena jurnalis lupa bahwa fungsi mereka yang paling utama adalah mengabarkan fakta sosiologis, bukan sekadar kutipan wawancara dari narasumber<sup>18</sup>.

Keenam, berita yang muncul di berbagai media massa cenderung sama. Pasalnya, dengan tuntutan untuk membuat dua atau tiga berita perhari, sementara gaji mereka minim, para jurnalis menempuh jalan pragmatis dan tidak profesional, yaitu melakukan *copy paste* atau duplikasi berita. Di sini muncul persoalan *diverstiy of content*.

Ketujuh, jurnalis tidak bekerja dengan profesional. Kualitas berita tidak terlalu bagus dan sering melanggar kode etik. Masih lekat dalam benak saya ketika masih bekerja di sebuah media massa lokal di Yogyakarta sekitar 10 tahun lalu. Waktu itu saya mengajak seorang rekan jurnalis membuat berita yang bagus. Jawabannya sungguh sangat mengagetkan. Dia bilang, "Menulis berita yang bagus? Memangnya kita ini dibayar berapa?"

Kualitas berita yang tidak bagus tidak hanya disebabkan faktor gaji yang buruk, sehingga menyebabkan para jurnalis bekerja asal-asalan. Akan tetapi, juga karena pihak perusahaan yang enggan mengeluarkan ongkos investasi perbaikan sumber daya manusia, seperti mengirim para jurnalisnya untuk mengikuti berbagai pelatihan, *refreshing* atau *up grading* keterampilan jurnalistiknya.

Sudah berkali-kali Dewan Pers mengkritik tentang rendahnya profesionalisme jurnalis di Indonesia. Setelah diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal kepada wartawan mengatakan pers Indonesia pada umumnya belum profesional. Indikatornya, masih banyak pengaduan dari masyarakat yang masuk ke

---

<sup>17</sup> Contoh berita-berita seperti ini misalnya banyak ditemukan dalam berita tentang produk mobil atau sepeda motor baru. Jarang sekali berita-berita tentang otomotif yang kritis, hampir semuanya selalu memuji kecanggihan produk otomotif yang baru itu.

<sup>18</sup> Ashadi Siregar, dosen senior Jurusan Komunikasi, Fisipol, UGM, dalam berbagai kesempatan selalu menekankan bahwa tugas utama jurnalis adalah mengungkapkan fakta sosiologis (kejadian yang riil terjadi) dan bukan *talking news* yang merupakan fakta psikologis (pendapat, opini atau komentar) seorang narasumber.

Dewan Pers tentang berita yang melanggar kode etik jurnalistik. Dari tahun 2003 hingga 2006, ada 538 pengaduan. "Kalau (pers) sudah baik, tentu Dewan Pers tidak banyak menerima pengaduan," ujar Ichlasul Amal<sup>19</sup>.

Beberapa bulan lalu, LeSPI (Lembaga Studi Pers dan Informasi) di Semarang mengadakan penelitian terhadap enam koran besar yang terbit di Jawa Tengah periode Desember 2008 hingga Januari 2009. Hasilnya 54,3 persen berita tentang kebijakan publik dibuat tanpa *cover both sides*<sup>20</sup>. Ini menjadi bukti lain tentang masih rendahnya profesionalisme jurnalis di Indonesia.

Dengan berbagai dampak seperti terurai di atas, maka pada dasarnya perusahaan media massa secara tidak langsung juga telah membatasi kebebasan pers. Tidak hanya konglomerasi yang menyebabkan terhambatnya kebebasan pers, tetapi eksploitasi terhadap jurnalis menyebabkan publik tidak mendapatkan berbagai berita yang bagus. Selain itu, hal ini menyebabkan juga terbatasnya *diversity of content* dan yang paling penting mengakibatkan institusi media massa menjadi tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estates*) secara maksimal.

IFJ mengkhawatirkan semua persoalan itu dapat memperlemah peran media massa dalam masyarakat demokratis, "*these changes appear to be having a negative impact on the quality of editorial content and may jeopardizing media's role as a watchdog for society.*" Selanjutnya IFJ juga mengatakan:

*"There are indications that insecurity in employment may be contributing to a decline in critical and investigative reporting; changes in media concentration and pressure from external forces may be leading to a creeping culture of self-censorship in the news media; those working in the news media are becoming increasingly aware of the cost of running a newspaper or broadcaster and the importance of advertising and this may be impacting on editorial decisions; and in some cases, poor wages are leading to a decline in ethical reporting due to corruption, or the 'envelope' tradition" (Walters dkk, 2006).*

### **Manajemen Baru**

Itulah yang terjadi ketika jurnalis mendapat perlakuan yang tidak sewajarnya dari pihak manajemen perusahaan media massa. Akibatnya jelas, media massa tidak mampu menjalankan perannya sebagai *the fourth estate* yang melakukan kontrol terhadap struktur kekuasaan (politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Sebagai gantinya, media massa justru (kadang-kadang) menjadi alat *public relation* dari instansi-instansi melalui jurnalisnya yang secara reguler mendapat jatah amplop atau dibayar setiap kali menulis berita.

Sejatinya, jurnalis tidak dapat disamakan dengan pekerja lainnya. *Pertama*, seorang jurnalis harus mempunyai keterampilan khusus bagaimana cara meliput

---

<sup>19</sup> Lihat ETIKA No. 42, Oktober 2006.

<sup>20</sup> Lihat *The Jakarta Post* edisi 17 Februari 2009.

peristiwa dan membuatnya dalam berita. *Kedua*, waktu kerjanya tidak beraturan dan cenderung melebihi waktu kerja dari para pegawai reguler. "Mitos" menyebutkan waktu kerja jurnalis adalah 24 jam kerja. *Ketiga*, jurnalis melakukan fungsi kontrol yang rawan mendapat suap dari pihak-pihak yang dikontrolnya. Ia harus mendapat gaji yang cukup, sehingga tidak mudah disogok.

Dengan paling tidak tiga alasan di atas, sudah sewajarnya jurnalis layak mendapat imbalan kerja yang lebih. Tentu tidak bisa disamaratakan untuk semua jurnalis, sebab juga harus disesuaikan dengan biaya hidup di masing-masing tempat tempat para jurnalis itu berada.

Sungguh tidak manusiawi jika ada perusahaan media massa yang memberikan gaji rendah, ini adalah suatu bentuk eksploitasi. Lebih parah lagi, banyak media massa (terutama di daerah) yang tidak memberikan asuransi kesehatan atau kecelakaan. Padahal, pekerjaan jurnalis juga cukup berbahaya. Sekali lagi AJI mencatat sepanjang tahun 2008 kasus kekerasan terhadap jurnalis ada 60.<sup>21</sup>

Mengingat dampaknya terhadap publik yang sangat luas, sudah sepantasnya manajemen perusahaan media massa menerapkan pendekatan baru yang lebih manusiawi terhadap jurnalis. Bukan untuk kepentingan jurnalis *an sich*, tetapi demi terpenuhinya kepentingan publik akan berita-berita berkualitas dan penting diketahui masyarakat.

Jika media massa dapat menghasilkan berita yang bagus, pada dasarnya perusahaan juga dapat menanggung untung yang banyak. Mengapa? Pada akhirnya publik juga akan mencari media massa yang memproduksi berita bagus dan bermanfaat bagi mereka. Bagi media massa cetak, oplah mereka dapat naik. Sedangkan, untuk media elektronik rating mereka dapat meningkat pula. Jika ini terjadi, ada peluang meraup iklan yang lebih banyak lagi, artinya pundi-pundi perusahaan akan semakin meningkat.

Mungkin sejarah perjalanan koran *The New York Times* dapat diambil sebagai pelajaran. Koran yang semula beroplah kecil ini setelah diambil alih oleh Adolph Ochs secara perlahan tetapi pasti mampu menjadi koran yang paling berpengaruh di Amerika Serikat (AS). Dari yang semula hanya beroplah 9.000 eksemplar bisa meningkat menjadi 900.000 eksemplar pada dekade 1980-an.

Menurut Ignatius Haryanto, salah satu kunci keberhasilan dari *The New York Times* adalah kredibilitasnya yang sangat tinggi. Ada 'setumpuk' kode etik yang harus ditaati para jurnalisnya. Inilah yang kemudian membuat masyarakat percaya dan membeli koran yang sudah berumur lebih dari 100 tahun itu<sup>22</sup>.

Tentu saja, pelaksanaan kode etik yang sangat ketat itu bisa dijalankan jika kondisi kesejahteraan jurnalisnya sangat bagus. Memang dalam buku itu tidak disebutkan berapa besar gaji jurnalis *The New York Times*. Namun, gambaran akan hal ini dapat dilihat dari penuturan wartawan senior kita, Aristides Katoppo yang pernah menjadi koresponden koran ini di Indonesia (1958-1964). Dalam pengantar buku Ignatius Haryanto itu, Aristides bertutur pernah membuat berita eksklusif untuk koran itu. Bonus yang ia terima untuk berita eksklusif itu 500 dolar AS! Kalau ditarik kurs

<sup>21</sup> Lihat Pernyataan Akhir Tahun 2008 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam [www.ajiindonesia.org](http://www.ajiindonesia.org).

<sup>22</sup> Untuk sejarah *The New York Times* bisa dibaca dalam buku karya Ignatius Haryanto, *The New York Times, Menulis Berita Tanpa Takut atau Memihak*, Jakarta, Yayasan Obor, 2006

sekarang maka setara dengan Rp 5 juta. Jika bonusnya saja sangat besar untuk satu berita, logikanya kesejahteraan jurnalisnya pasti bagus.

Akan tetapi, meminta pihak perusahaan media massa supaya 'sadar' dan mau memperbaiki kondisi ini tampaknya sangat naif. Perlu ada tekanan dari luar yang secara kontinyu terus mendorong pihak perusahaan untuk melakukan hal ini. Kecuali, jika para pemiliknya adalah para jurnalis yang idealis dan tahu dengan persis peran media massa dalam masyarakat demokratis.

Perguruan tinggi (jurusan komunikasi) dapat memainkan peran sebagai *pressure group*. Wacana tentang manajemen media massa harus memasukkan unsur pentingnya kesejahteraan jurnalis. Perguruan tinggi dapat memproduksi berbagai pemikiran tentang manajemen media massa yang baik, termasuk bagaimana mengatur SDM yang bagus bagi jurnalis. Pemikiran inilah yang kemudian disebarkan ke publik agar menjadi masukan bagi berbagai perusahaan media massa.

Jurusan komunikasi juga dapat membuat penelitian ilmiah mengenai dampak dari kondisi kerja jurnalis terhadap kualitas berita. Ini juga perlu dilakukan. Selama ini jurusan komunikasi lebih banyak melakukan analisis framing berita atau kebijakan redaksi. Hasil dari arah baru upaya riset ini kemudian dibagikan kepada publik dan tentu saja kepada Dewan Pers yang mempunyai fungsi untuk melakukan kontrol terhadap media massa.

Jurusan komunikasi di perguruan tinggi juga harus memberikan gambaran riil tentang industri media massa kepada para mahasiswa yang berminat menjadi jurnalis. Salah satunya adalah soal isu kesejahteraan jurnalis. Dengan mengetahui isu ini, mereka dapat bersiap-siap untuk masuk ke dunia media massa yang semakin kapitalistik. Mereka mempunyai pilihan tetap akan masuk atau tidak. Jika tetap akan masuk, perguruan tinggi sudah membekali dengan ilmu tentang beberapa hal yang harus mereka lakukan.

Salah satunya adalah bekal ilmu pengetahuan tentang serikat pekerja. Saya kira, ini adalah subtopik yang selama ini tidak pernah diberikan dosen kepada para mahasiswa jurusan komunikasi ketika mereka belajar tentang manajemen media massa. Jurnalis meskipun sebuah profesinya mempunyai mekanisme *self regulation* dan memiliki kode etik tetapi ketika bekerja untuk sebuah perusahaan dan mendapat upah, maka mereka sejatinya adalah pekerja atau buruh<sup>23</sup>.

Selain jarang diajarkan, buku-buku tentang manajemen media massa yang terbit di Indonesia juga tidak pernah menyinggung persoalan ini<sup>24</sup>. Padahal, buku-buku sejenis yang terbit di luar negeri, terkadang juga membahas soal ini. Contohnya, buku karya Peter K. Pringle dan Michael F. Star yang berjudul *Electronic Media Management* (Focal Press, 2006). Di dalam buku ini dijelaskan bagaimana pihak manajemen harus berurusan dengan serikat pekerja.

---

<sup>23</sup> Organisasi profesi untuk jurnalis yang paling besar di dunia adalah International Federation of Journalist (IFJ) yang bemarkas di Brussel. Organisasi ini juga mengklaim dirinya sebagai organisasi serikat pekerja. Anggota IFJ ada 160 serikat pekerja (termasuk AJI) dan tersebar di 120 negara.

<sup>24</sup> Sejauh ini, hanya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang sudah menerbitkan tentang pentingnya serikat pekerja dalam perusahaan media massa.

Dengan membahas soal serikat pekerja (SP), para mahasiswa komunikasi dapat mengetahui tentang pentingnya SP dalam sebuah perusahaan. SP adalah instrumen untuk memperjuangkan hak dan sekaligus mendisiplinkan pekerja tentang kewajibannya yang harus dilaksanakan.<sup>25</sup> Hanya melalui SP, kesejahteraan jurnalis dapat diperjuangkan secara efektif. Selain itu, dengan belajar hal ini di perguruan tinggi, mereka juga tahu bagaimana cara membuat atau memperkuat serikat pekerja.

Pihak universitas di Indonesia (jurusan komunikasi) perlu terus mendorong terciptanya serikat pekerja di perusahaan media massa. Sebab organisasi ini juga dapat mendorong terciptanya berita-berita yang bermutu karena jurnalisnya relatif terlindungi dan sejahtera. Sayangnya, belum banyak perusahaan media massa di Indonesia yang mempunyai serikat pekerja. Di luar negeri hal itu sudah menjadi suatu hal yang umum, bahwa jurnalis adalah pekerja dan biasanya menjadi anggota serikat pekerja jurnalis.

Di Indonesia baru beberapa media massa nasional yang mempunyai serikat pekerja atau embrio serikat pekerja<sup>26</sup>. Misalnya, serikat pekerja di *Tempo*, *The Jakarta Post* dan *SCTV*. Dari ratusan media massa yang tersebar di Indonesia, baru ada 28 media massa yang mempunyai serikat pekerja. Sebanyak 23 serikat pekerja pers ada di Jakarta, sisanya di luar Jawa dua media, Surabaya dua media, dan Surakarta satu media<sup>27</sup>.

Minimnya media massa yang mempunyai serikat pekerja ini sebetulnya agak ganjil. Pasalnya, para jurnalis adalah orang-orang yang relatif berpendidikan tinggi dan mempunyai kesadaran politik yang tinggi. Namun kenyataannya, mereka justru tertinggal dengan berbagai perusahaan lainnya yang kebanyakan sudah memiliki serikat pekerja dan berfungsi dengan baik.

Sekitar tahun 2006 penulis pernah membuat penelitian tentang serikat pekerja di sebuah toko Swalayan di Yogyakarta. Hasilnya sangat bagus, mereka mempunyai serikat pekerja yang efektif, mempunyai kontrak kerja bersama yang secara detail mengatur berbagai hak dan kewajiban pekerja. Di pihak lain, tidak ada satu pun perusahaan media massa di Yogyakarta yang mempunyai serikat pekerja dan mempunyai surat perjanjian kerja bersama yang sangat rinci.

Sejauh ini, saya kira baru AJI yang aktif mengkampanyekan tentang pentingnya pembentukan serikat pekerja di setiap perusahaan media massa. AJI Yogyakarta sendiri sudah dalam beberapa tahun ini melakukan kampanye mendorong para jurnalis di Yogyakarta untuk mendirikan serikat pekerja. Namun, tampaknya para jurnalis sendiri kurang berminat soal ini. Hal ini yang menurut saya agak aneh, sebab secara riil teman-teman jurnalis menghadapi berbagai persoalan tenaga kerja yang cukup berat. Selain itu, mereka relatif berpendidikan tinggi dan paham betul apa arti dari organisasi.

Memang, di lingkungan media massa isu serikat pekerja sering dianggap membahayakan. Beberapa kawan jurnalis yang bekerja di media massa dan berjuang untuk membuat atau mengaktifkan serikat pekerja justru dipecat. Lagi-lagi ini adalah

---

<sup>25</sup> Selama ini, serikat pekerja selalu mendapat stigma negatif sebagai organisasi yang membuat repot perusahaan karena sering menuntut berbagai hal atau melakukan demonstrasi. Padahal, di sisi lain SP juga meminta para pekerja untuk menaati persetujuan kesepakatan kerja yang dibuat antara SP dan pihak manajemen. SP juga bisa memberikan sanksi kepada para pekerja yang tidak disiplin.

<sup>26</sup> Biasanya belum menyebut secara jelas sebagai serikat pekerja, tetapi masih dewan karyawan, perkumpulan keluarga, dsb.

<sup>27</sup> Lihat hasil penelitian AJI Jakarta bersama ACILS yang berjudul *Peta Serikat Pekerja Pers di Indonesia*.

sebuah ironi yang terjadi di dalam media massa, salah satu lembaga penegak nilai-nilai demokrasi yang justru membatasi kebebasan jurnalis dalam berserikat yang dijamin dalam sistem demokratis. Mengapa ini bisa terjadi?

Membuat SP bukanlah suatu tindakan kriminal. Indonesia juga mempunyai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan hak para pekerja untuk membuat serikat pekerja<sup>28</sup>. Pemahaman ini harus diluruskan karena SP justru menjadi alat untuk memperbaiki diri dari dalam. Dengan SP, kesejahteraan jurnalis dapat terjamin atau paling tidak ada mekanisme untuk memperjuangkannya sehingga dapat meningkatkan kinerja jurnalis dalam membuat berita.

## Penutup

Banyak pihak, tidak terkecuali Dewan Pers sudah mengingatkan kesejahteraan yang rendah adalah salah satu faktor yang menyebabkan para jurnalis tidak dapat bekerja secara profesional. Ujungnya, media massa tidak dapat menjadi alat untuk memainkan perannya sebagai alat pengontrol yang efektif. Salah satu penyebab yang cukup esensial adalah karena manajemen media massa yang tidak memberi penghargaan (dalam bentuk gaji) yang cukup bagi para jurnalis. Istilahnya, *over work under pay*. Kondisi ini tentu tidak dapat dibiarkan terus berlangsung. Jika kita masih yakin bahwa media massa adalah salah satu pilar demokrasi, maka kondisi ini harus diperbaiki guna meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi kita.

Perusahaan media massa seharusnya menyadari persoalan ini. Seorang jurnalis bekerja untuk ranah publik karena itu mendapat perlindungan dari UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers sehingga tidak dapat begitu saja senaknya membuat berita yang tidak berkualitas. Publik berhak mendapat informasi atau berita yang bagus dan berguna, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan secara kolektif atas berbagai persoalan yang ada. Namun, godaan untuk terus memperbesar keuntungan (profit) terkadang menjadi hambatan untuk mencapai tujuan ini.

Untuk itu, perlu ada dorongan eksternal. Perguruan tinggi atau universitas memiliki posisi strategis untuk melaksanakan hal ini. *Pertama*, dengan mewacanakan pentingnya kesejahteraan jurnalis kepada publik. Harapannya, hal ini menjadi wacana publik yang dapat memberi masukan kepada perusahaan media massa. Dalam menjalankan perannya ini perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan Dewan Pers sebagai lembaga yang mempunyai otoritas untuk menata persoalan pers.

*Kedua*, memberikan bekal kepada mahasiswa jurusan komunikasi, khususnya yang berminat menjadi jurnalis mengenai pengetahuan tentang pentingnya kesejahteraan jurnalis. Ini akan menjadi bekal penting bagi mereka, khususnya saat bekerja menjadi jurnalis mereka dapat memberikan dorongan atau masukan bagi perusahaan media massa bahwa kesejahteraan jurnalis adalah basis penting bagi terciptanya profesionalisme kerja.

---

<sup>28</sup> Lihat dalam UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Pasal 5 ayat 1 menyatakan, "Setiap pekerja/buruh berhak menentukan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh."

*Ketiga*, perguruan tinggi juga membekali para calon jurnalis dengan ilmu tentang serikat pekerja pers atau media massa. Harapannya ketika mereka menjadi jurnalis, mereka tidak awam dengan isu ini dan mampu menjadi aktivis bagi terciptanya sebuah serikat pekerja. Serikat pekerja adalah mekanisme *pressure* dari dalam perusahaan media massa untuk terus memperbaiki diri, sehingga mampu menciptakan berita-berita yang berkualitas. Berita yang berkualitas pada gilirannya juga akan memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan media massa.

### **Daftar Pustaka**

- Aliansi Jurnalis Independen. 2006. *Potret Jurnalis Indonesia: Survey AJI Tahun 2005 tentang Media dan Jurnalis Indonesia di 17 Kota*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
- AJI Jakarta. 2001 *Pekerja Pers Berserikat untuk Kesejahteraan dan Profesionalisme*. Jakarta: AJI Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Peta Serikat Pekerja Pers di Indonesia*. Jakarta: AJI Jakarta dan ACILS.
- Budiyanto, Rochman; Mabroer MS. 2000. *Potret Sosial Ekonomi Jurnalis Jawa Timur: Kesejahteraan Jurnalis antara Mitos dan Kenyataan*. Surabaya: AJI Surabaya dan The Asia Foundation.
- Hachten, William A. 2005. *The Troubles of Journalism: A Critical Look at What's Right and Wrong With the Press*. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Haryanto, Ignatius. 2006. *The New York Times, Menulis Berita Tanpa Takut atau Memihak*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Walters, Emma; Warren, Christopher; Dobbie, Mike. 2006. *The Changing Nature of Work: A global survey and case study of atypical work in the media industry*. International Federation of Journalist.
- ETIKA, *Berita Dewan Pers*, Oktober 2006.
- ETIKA, *Berita Dewan Pers*, November 2006.
- ETIKA, *Berita Dewan Pers*, November 2007
- The Jakarta Post*, edisi 17 Februari 2009.
- "Lebih dekat dengan Ichlasul Amal, Ketua Dewan Pers Dua Periode", dimuat dalam <http://sosokteladan.epajak.org/category/ichlasul-amal>
- Pernyataan Akhir Tahun 2008 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam [www.ajiindonesia.org](http://www.ajiindonesia.org).
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.